

BAB III

ALASAN INGGRIS MELIBATKAN DIRI SECARA MILITER DALAM PERANG SURIAH

Penggunaan senjata kimia oleh Suriah selama perang yang dimulai sejak tahun 2010, telah menimbulkan reaksi serta aksi yang datang dari dunia Internasional. Tidak sedikit negara-negara di dunia yang telah memberikan kecaman hingga sanksi bagi Suriah. Termasuk di dalamnya adalah Inggris yang pada bulan April 2018 telah mengambil keputusan untuk menyerang Suriah melalui serangan udara sebagai bentuk protes digunakannya senjata kimia dalam perang Suriah. Berdasarkan hal tersebut, pada bab III ini penulis akan memaparkan bentuk keterlibatan Inggris secara militer dalam perang Suriah, alasan Inggris untuk melibatkan diri ke dalam perang Suriah serta justifikasi atas tindakannya tersebut. Penjelasan tersebut akan terbagi ke dalam dua sub bab sebagai berikut.

A. Keterlibatan Inggris secara Militer dalam Perang Suriah

1. Kepentingan Nasional Inggris

Pada sebuah dokumen yang dipublikasikan oleh pemerintah Inggris pada tahun 2010, menyatakan bahwa tugas utama negara dan pemerintahan Inggris adalah akan dan tetap mengenai keamanan negara Inggris. Ditambahkannya bahwa saat ini Inggris berada pada kondisi yang lebih aman namun juga lebih rentan dibandingkan sebelumnya. Lebih aman karena Inggris tidak lagi berhadapan dengan

ancaman konvensional berupa serangan dari kekuatan musuh *face-to-face* di masa lalu. Namun juga lebih rentan dari sebelumnya karena Inggris merupakan salah satu negara yang masyarakatnya paling terbuka di dalam dunia yang saling terhubung satu sama lain dibanding sebelumnya dimana hal ini dapat membuat Inggris menjadi sasaran mudah akan terjadinya serangan yang ditunjukkan terhadap Inggris (UK, 2010).

Pada masa Perang Dunia contohnya, ancaman yang ada adalah nyata dan jelas dimana Uni Soviet memiliki pasukan yang tersebar di hampir setengah bagian benua Eropa dengan ancaman yang konstan berupa kemungkinan konfrontasi menggunakan nuklir diantara dua negara adidaya yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. Setelah Perang Dingin berakhir lalu terjadi beberapa peristiwa di dunia yang menyangkut aksi teror seperti serangan 9/11, kemudian munculnya *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* dan perang di kawasan Timur Tengah termasuk Perang Suriah (UK, 2010).

Inggris bahkan tidak luput menjadi pihak yang juga menghadapi ancaman yang bentuknya sudah berbeda dan juga jauh lebih kompleks yang datang dari berbagai sumber. Ancaman tersebut berupa terorisme, serangan *cyber*, serangan non-konvensional menggunakan senjata kimia, senjata nuklir, atau senjata biologis yang termasuk didalamnya adalah berupa bencana alam yang keseluruhan ancaman-ancaman di atas dapat menimbulkan kerusakan serta kehancuran bagi Inggris (UK, 2010).

Karena hal tersebut, Inggris memiliki rangkaian strategi serta tujuan yang hendak dicapai guna mengamankan Inggris dari kemungkinan ancaman yang dapat terjadi di

kemudian hari. Rangkaian strategi dan tujuan Inggris ini disebut kepentingan nasional yang termanifestasi dalam lingkup untuk menciptakan stabilitas kawasan yang lebih luas yakni dunia internasional, permasalahan migrasi, menciptakan kondisi yang aman, adil, dan tertib yang menjamin warga Inggris serta dunia untuk menjalani hidup bebas tanpa rasa takut, dan sikap kontra-terorisme berupa aksi deterren terhadap tindakan musuh (Development, 2018).

Berdasarkan rumusan kepentingan nasional di atas, Inggris dalam menjalankan pemerintahannya dibawah pimpinan Perdana Menteri David Cameron telah menaruh fokus lebih terhadap peperangan di Suriah. Hal ini dikarenakan peperangan yang terjadi di Suriah memiliki ancaman yang kompleks dan berbahaya bagi keamanan Inggris dan dunia internasional secara umum. Ancaman tersebut salah satunya menyangkut eksistensi *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* yang telah menebar teror di hampir seluruh negara di dunia. Pihak-pihak yang terlibat didalamnya pun adalah aktor-aktor besar dunia baik negara-negara besar dan kuat maupun organisasi internasional. Ditambah lagi dengan adanya serangan teroris yang terjadi di Paris, Prancis pada 15 November 2015 yang menewaskan 130 orang yang dilakukan oleh ISIS sehingga rencana koalisi untuk menyerang ISIS akan menjadi tindakan penting sebagai tanda solidaritas bersama Prancis (Chalmers, November 2015).

Perdana Menteri David Cameron yang menjabat sejak tahun 2010 hingga 2016 selalu berusaha untuk meyakinkan Parlemen Inggris untuk tidak hanya bertindak secara “pasif” dalam perang Suriah seperti pemberian bantuan

kemanusiaan dan penerimaan pengungsi namun juga terlibat secara militer didalamnya. Secara militer disini maksudnya adalah keinginan untuk menyerang Suriah bersama sekutu Inggris seperti Amerika, Prancis, dan beberapa negara Timur Tengah yang lain berupa serangan udara yang ditujukan kepada ancaman-ancaman riil seperti ISIS dan senjata kimia Suriah. David yakin bahwa dengan dilakukannya hal tersebut dapat membuat Inggris lebih aman (News, UK, 26).

Namun tidak hanya ancaman terorisme yang dihadapi, ancaman berupa penggunaan senjata kimia oleh Suriah sejak tahun 2012 kemudian telah membuat Inggris makin yakin untuk terlibat lebih jauh berupa intervensi militer. Perdana Menteri David Cameron pun melakukan upaya yang pertama yang dengan mengajukan mosi kepada anggota Parlemen Inggris pada tahun 2013 untuk menyetujui usulannya agar Inggris bertindak secara militer dengan menyerang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad sebagai bentuk deteren penggunaan senjata kimia pada Perang Suriah yang terjadi pada 21 Desember 2013 yang diduga telah menewaskan ratusan penduduk sipil di Damaskus dan sekaligus mencederai peraturan hukum internasional mengenai senjata kimia (News, UK, 2013).

Tetapi upayanya yang pertama ini menghasilkan keputusan dimana Parlemen Inggris tidak menyetujui untuk melakukan serangan militer setelah diadakan *voting*. Pemimpin Partai Buruh (*Labour Party*), Ed Milliband mengatakan bahwa Dewan Rakyat (*House of Commons*) tidak menyetujui mosi tersebut demi dan atas nama rakyat Inggris Raya. Rakyat Inggris sangat prihatin dengan penggunaan senjata kimia pada Perang Suriah, namun mereka menginginkan

pemerintah Inggris untuk belajar dari keterlibatan Inggris dalam perang di Irak. Mereka tidak menginginkan perang yang ditimbulkan dari suatu keputusan yang terburu-buru, mereka menginginkan semua berjalan dengan cara yang benar dan tepat yaitu melalui kerjasama dengan komunitas internasional. Ed juga menambahkan bahwa Inggris tidak harus bertindak sembrono dengan kepemimpinan yang impulsif, melainkan Inggris membutuhkan kepemimpinan yang tenang dan terarah (News, UK, 2013).

Sekretaris Menteri Pertahanan mengatakan kepada program *Newsnight* BBC bahwa Perdana Menteri dan dirinya merasa kecewa dengan hasil yang dikeluarkan oleh Dewan Rakyat yang dianggapnya dapat mencederai hubungan Inggris dengan Washington dan beberapa sekutunya yang lain (News, UK, 2013).

Tidak hanya berhenti pada upaya yang pertama, Perdana Menteri David Cameron kemudian mencoba untuk meyakinkan kembali Parlemen Inggris pada upayanya yang kedua di tahun 2015. Kali ini, David Cameron datang dengan menghadirkan 7 poin penting mengenai alasan mengapa Inggris harus benar-benar melakukan serangan terhadap Suriah berupa serangan udara militer jika kepentingan nasional Inggris ingin terwujud. Ketujuh (7) poin tersebut adalah sebagai berikut (Cameron, 2015).

1. Melindungi Inggris dengan mempertahankan kemampuan anti-terorisme yang kuat.
2. Menyelenggarakan negosiasi pada penyelesaian politik, bersamaan dengan

- mempertahankan oposisi yang moderat.
3. Membantu mewujudkan pemerintah Suriah yang kredibel yang mewakili penduduk Suriah.
 4. Mendegradasi serta mengalahkan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* melalui koalisi militer dengan aksi yang lebih luas.
 5. Secara berkelanjutan berperan dalam bantuan kemanusiaan dan mencegah migrasi lebih lanjut menuju Eropa.
 6. Mendukung stabilisasi yang telah berlangsung di Irak dan merencanakan rekonstruksi pasca konflik di Suriah.
 7. Bekerjasama dalam kemitraan yang kuat dengan sekutu di seluruh kawasan Timur Tengah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh ISIS dan kelompok ekstremis yang lain.

David Cameron dalam pidatonya menyatakan “Para teroris ini berencana untuk membunuh kita dan meradikalisasi anak-anak kita sekarang. Mereka menyerang kita karena siapa kita, bukan karena apa yang kita lakukan.” David juga menambahkan “Pertanyaannya adalah ini: apakah kita bekerja dengan sekutu kita untuk menurunkan dan menghancurkan ancaman ini, dan apakah kita mengejar para teroris ini di tanah kelahiran mereka, dari tempat mereka

berencana untuk membunuh orang Inggris, atau apakah kita duduk dan menunggu mereka untuk menyerang kita?" (Elizabeth Piper, 2015).

Urgensi dari dilakukannya upaya yang kedua dari David Cameron tersebut berdasar kepada kekuatan ISIS yang semakin berkembang besar dan kuat ketika pada tahun 2014, ISIS berhasil menguasai kota Mosul, Irak yang diklaim sebagai pusat kekalifahannya di dunia yang dimana daerah kekuasaannya bahkan telah meliputi beberapa kota besar di Suriah. (Elizabeth Piper, 2015).

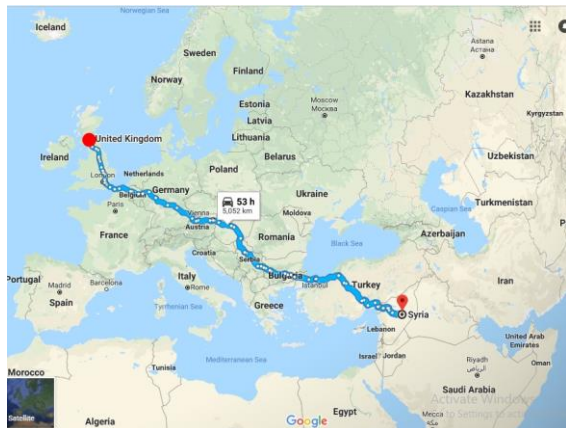
Melihat ancaman yang datang semakin nyata dan berbahaya bagi keamanan Inggris, setelah melalui perdebatan panjang yang memakan waktu hingga 10 jam, Parlemen Inggris melakukan pemungutan suara yang menghasilkan keputusan bahwa Inggris akan melakukan serangan udara terhadap ISIS di Suriah yang diperoleh dari 397 anggota parlemen setuju untuk melakukan serangan sedangkan 223 tidak setuju. Kemenangan David Cameron atas keputusan ini membawa kemungkinan kembalinya peran kuat Inggris dalam kancah internasional. Pada skala domestik, Cameron mengekspresikannya dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond yang menyatakan bahwa "Inggris aman malam ini berkat keputusan yang diambil oleh Dewan Rakyat (*House of Commons*)."

 (Elizabeth Piper, 2015).

Namun demikian, serangan udara Inggris tidak mungkin mengubah keseimbangan militer yang telah ada, mengingat Amerika Serikat sudah terlibat ke dalam perang Suriah. Tetapi pemungutan suara tersebut memberi Cameron kesempatan untuk menunjukkan kesediaan Inggris untuk menambah konsensus Barat untuk membawa pertempuran ke militan di Suriah. (Elizabeth Piper, 2015)

Serangan tersebut kemudian di lancarkan pada tahun 2015 tepatnya bulan Desember bersama koalisi bentukan Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 2014 yang dinamakan *Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve* yang bertujuan untuk menurunkan kekuatan hingga menghancurkan ISIS. Ini kemudian sejalan dengan tujuan Inggris yang tertuang ke dalam kepentingan nasionalnya untuk menyerang dan menurunkan kekuatan ISIS. (Jones C. , 2018).

Gambar 3.1 Peta Jarak antara Inggris dengan Suriah



Sumber : (Google Maps, 2018)

Jika sebelumnya kepentingan nasional Inggris dibawah Perdana Menteri David Cameron berfokus kepada melemahkan dan menghancurkan kekuatan ISIS dan kapabilitas senjata kimia Suriah, dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Theresa May Inggris memiliki kepentingan nasional yang hanya berfokus pada tindakan untuk mendeteren senjata kimia Suriah. Mengingat sudah banyak penggunaan senjata kimia yang dilakukan selama perang sejak tahun 2012. Penggunaan senjata kimia yang terbaru sebelum

Inggris melancarkan serangan udara terhadap Suriah adalah penggunaan senjata kimia di kota Dhouma di awal tahun 2018 yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. (Dettmer, 2018).

May mengatakan bahwa Inggris harus segera mengambil tindakan guna melindungi “keamanan operasional” negaranya. May menambahkan pula bahwa tindakan yang tepat yang harus diambil oleh Inggris bersama dengan sekutunya yaitu Amerika Serikat dan Prancis adalah dengan menyerang pusat persediaan senjata kimia Suriah. May tidak dapat membiarkan penggunaan senjata kimia menjadi sesuatu yang normal, dijalankan Inggris atau bahkan di dunia (Dettmer, 2018). Serangan ini dilakukan pada tanggal 14 April 2018 berupa serangan udara dan pengiriman misil dari kapal induk milik Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada pernyataan yang dikeluarkannya May mengatakan “*We have always been clear that the government has the right to act quickly in the national interest.*” (Sandford, 2018).

Tujuan dilakukannya serangan tersebut adalah untuk menurunkan kapasitas senjata kimia Suriah dan melindungi jatuhnya korban dari penduduk sipil yang lebih banyak. May tidak melakukan ini karena diminta oleh Presiden Trump, namun memang serangan itulah yang merupakan satu-satunya cara yang paling tepat yang dapat dilakukan melihat cara diplomatik sudah tidak memungkinkan dan tidak membuahkan hasil (Dettmer, 2018).

Berikut merupakan pernyataan May mengenai keputusannya untuk meluncurkan serangan kepada persediaan senjata kimia milik Suriah:

- a. Fakta bahwa kekejaman dengan menggunakan senjata kimia adalah “noda bagi kemanusiaan”. Seperti serangan yang terjadi di Dhouma menewaskan 75 orang

serta melukai 500 lainnya. Serta berbagai serangan senjata kimia yang lain yang jelas melanggar Protokol Jenewa 1925 dimana Suriah meratifikasi hukum internasional tersebut.

- b. Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa rezim yang memimpin Suriah bertanggungjawab atas serangan yang terjadi. Bom barel dijatuhkan melalui helikopter – sedangkan pihak oposisi tidak memiliki helikopter; tidak ada kelompok lain yang dapat melakukannya.
- c. Rusia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Diketahui bahwa Rusia mengintervensi perang Suriah sejak tahun 2015 untuk membantu rezim Bashar al-Assad. Rusia tidak membenarkan adanya penggunaan senjata kimia dan malah berbalik menuduh Inggris terlibat dalam serangan di Dhouma sebagai cara untuk menaikkan tensi anti-Rusia (The Straits Times, 2018).
- d. Serangan udara yang dilancarkan berlatar belakang kepada serangan senjata kimia dan Inggris percaya bahwa Suriah akan terus menggunakannya. Benar terbukti, pemerintah Suriah nyatanya gagal untuk menindaklanjuti kesepakatan yang bertujuan agar menanggalkan senjata kimia.

Diketahui bahwa pada 24 Agustus 2013 Suriah setuju untuk bergabung ke dalam Konvensi Senjata Kimia 1997 yang melarang penggunaan, kepemilikan, serta produksi senjata kimia oleh suatu negara. Selain itu Suriah pun setuju terhadap kesepakatan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons/OPCW*) untuk menghancurkan persediaan senjata kimia yang dimilikinya terhitung sejak 14 September 2013. Kemudian pada 4 Januari 2016, OPCW menyatakan bahwa proses penghancuran telah semuanya lengkap dan hancur namun sejak pernyataan dikeluarkan, serangan dengan senjata kimia tetap terjadi yang dilakukan oleh rezim pemerintah Assad (Patrick Wintour, 2018).

- e. Serangan udara yang dilakukan Inggris adalah benar dimata hukum dimana targetnya adalah lokasi tempat persediaan senjata kimia berada yang jauh dari pemukiman penduduk.
- f. Inggris tidak menunggu investigasi yang dilakukan oleh OPCW hingga selesai; investigasi terhambat sedangkan serangan senjata kimia terus berlanjut.

- g. Inggris tidak mengikuti perintah Amerika Serikat, namun tindakan tersebut sejalan dengan kepentingan nasional Inggris; senjata kimia tidak boleh dinormalisasi dan perlunya sikap deteren untuk mendegradasi kapabilitas senjata kimia Suriah (News, UK, 2013).
- h. Tindakan tersebut bukan tentang ikut campur dalam perang atau upaya untuk mengganti rezim yang berkuasa. Melainkan upaya untuk memaksimalkan usaha dalam menurunkan kapabilitas senjata kimia dan meminimalisir korban dari penduduk sipil yang lebih banyak. Hal ini seperti pernyataan yang di keluarkan oleh May *“The speed with which we acted was essential in cooperating with our partners to alleviate further human suffering and to maintain the vital security of our operations. We have always been clear the government has the right to act in the national interest.”*
- i. Diperlukannya keputusan dan tindakan sesegera mungkin sehingga tidak ada peran Parlemen Inggris dalam keputusan tersebut; pemerintah Inggris pun memiliki hak untuk bertindak sendiri dan bertanggung kepada Parlemen Inggris.

- j. Hak Inggris untuk membela aturan dan standar global.

Singkatnya, secara spesifik Inggris tidak hanya ingin mendeteren kekuatan rezim Suriah, namun Inggris juga ingin memberikan pertanda jelas kepada siapapun yang percaya bahwa mereka dapat menggunakan senjata kimia tanpa ada hukuman atas tindakannya tersebut (Dettmer, 2018).

2. Proses Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri Inggris

Inggris sebagai negara yang sejak perang Suriah dimulai sudah terlibat didalamnya berupa bantuan kemanusiaan, memiliki strategi dan rencana aksi yang sudah terealisasi yaitu mengintervensi secara militer ke dalam perang Suriah melalui serangan udara bersama dengan sekutu; Amerika Serikat dan Prancis. Proses pengambilan keputusan politik luar negeri Inggris ini didasari oleh model rasional, model birokrasi, dan *individual decision making* serta mengalami perubahan pada kebijakan politik luar negeri karena adanya perubahan yang dipengaruhi oleh peristiwa yang datang dari dunia internasional.

Model rasional karena dalam merumuskan kebijakan tersebut, Inggris menimbang kemungkinan keuntungan dan kerugian yang ada dari bergabung dengan koalisi untuk menyerang Suriah. Keuntungan dari melakukan intervensi militer terhadap persediaan senjata kimia Suriah sejak keputusan ini di sponsori oleh keinginan Perdana Menteri David Cameron hingga Perdana Menteri Theresa May adalah sebagai berikut.

- a. Serangan yang dilakukan akan membantu penduduk sipil untuk bebas dari kontrol ISIS

ISIS di Suriah menyiksa penduduk sipil, memenggal bagi mereka yang non-Muslim dan merajam orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual. Beberapa pihak percaya bahwa dengan melemahkan mereka dengan serangan udara, ada kesempatan baru yang muncul bagi kelompok-kelompok lokal untuk mengambil kembali kontrol daerah mereka yang dikuasai oleh ISIS. Dengan serangan udara, penduduk sipil yang hidup dibawah kontrol ISIS akan memiliki kesempatan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

- b. Mencegah digunakannya kembali senjata kimia di masa yang akan datang

Serangan koalisi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada awal tahun 2018 ini berhasil menarget tiga fasilitas senjata kimia milik Suriah dimana secara total terdapat 105 misil yang ditembakkan (Greenfield, 2018). Theresa May mengatakan bahwa “*this act is to degrade the Syrian regime’s chemical weapons capability and deter their use.*” Dapat diketahui bahwa kapabilitas senjata kimia Suriah

mengalami penurunan karena ketiga fasilitas tersebut adalah pertama, Pusat Penelitian Sains di Barzeh dekat Damaskus yang diyakini memiliki hubungan dengan proses produksi senjata kimia dan biologi, kedua, yaitu fasilitas di kota Homs yang termasuk didalamnya adalah gudang persediaan berupa bahan-bahan dan peralatan senjata kimia (Hashem Osseiran, 2018).

Sedangkan model birokrasi yang digunakan maksudnya adalah keputusan politik luar negeri yang dihasilkan dari proses diskusi dan tawar-menawar antara para pembuat keputusan pada sebuah pemerintahan (Jones C. M., 2017). Pada kasus Inggris ini, Parlemen Inggris terlibat ke dalam keputusan luar negeri yang diambil pada saat kepemimpinan David Cameron yang melewati proses pemungutan suara.

Proses pemungutan suara ini terjadi dua kali. Pertama pada tanggal 29 Agustus 2013 dan yang kedua pada 2 Desember 2015. Awalnya, pemerintah Inggris dalam hal ini Perdana Menteri David Cameron mengajukan mosi kepada Dewan Rakyat (Parlemen Inggris) mengenai perlunya dilakukan serangan militer terhadap Suriah sebagai tindakan untuk mendeter senjata kimia dan untuk melemahkan ISIS. Selanjutnya Cameron membacakan pidato yang berisikan argumen mengapa mosi tersebut diambil yang dimana pidato ini adalah bagian dari proses *lobbying* serta *bargaining* dengan Dewan Rakyat. Dewan Rakyat kemudian memberikan suaranya pada proses *voting* apakah mereka

setuju atau tidak setuju terhadap mosi yang telah diajukan sebelumnya (Parliament UK, 2018).

Sedangkan pada model *Individual decision making*, proses pengambilan keputusan luar negeri diperoleh atau diambil oleh individual yang memiliki peran atau kekuasaan seperti seorang Presiden atau Perdana Menteri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, serangan udara oleh Inggris di awal 2018 diputuskan tanpa melalui Dewan Rakyat atau Parlemen Inggris. Theresa May sebagai Perdana Menteri mengatakan bahwa keputusan yang diambil adalah legal dan secara moral sudah benar. Keputusan ini tanpa melalui pemungutan suara atau persetujuan Parlemen Inggris seperti halnya yang dilakukan oleh David Cameron karena menurutnya, kondisi yang terjadi memiliki urgensi yang kuat yang membutuhkan keputusan cepat. Pemerintah pun memiliki wewenang untuk bertindak sendiri dan dapat mempertanggung jawabkannya kelak kepada parlemen setelah serangan dilancarkan (Sandford, 2018). Kemampuan Perdana Menteri Theresa May untuk mengambil tindakan berupa serangan militer adalah salah satu hak prerogatif kerajaan. Pemerintahan diijinkan untuk menggunakan kekuasaan tersebut atas nama kerajaan (Ben Wright, 2018).

Hak Prerogatif Kerajaan atau biasa disebut sebagai *Royal Prerogative in the United Kingdom* adalah sebuah otoritas adat, hak istimewa, dan kekebalan yang melekat pada Kerajaan Inggris (atau "berdaulat"), yang diakui di Inggris. Kerajaan dianggap secara

internal sebagai otoritas yang absolut, atau "satu-satunya yang memiliki hak prerogatif", dan hak prerogatif ini adalah sumber dari banyak kekuatan eksekutif pemerintah Inggris.

Hak Prerogatif tersebut merupakan salah satu elemen yang paling signifikan dalam konstitusi Inggris. Konsep ini pertama kali muncul pada abad pertengahan yang berlaku bagi Raja yang memimpin pada abad tersebut sebagai kepala kerajaan. Pada masa modern, Hak Prerogatif memungkinkan para Menteri, di antara banyak hal lainnya, untuk mengerahkan pasukan bersenjata, memutuskan sebuah perjanjian internasional dan untuk memberikan penghargaan. Dengan kata lain, Menteri berhak untuk menggunakan sebagian besar Hak Prerogatif baik dalam hak mereka sendiri atau melalui saran yang mereka berikan kepada Ratu yang harus Ratu ikuti secara konstitusional.

Tiga prinsip dasar Hak Prerogatif adalah:

1. Merupakan kekuasaan tertinggi hukum dasar negara Inggris (statuta). Namun ketika terjadi konflik antara Hak Prerogatif dengan hukum dasar (Konstitusi) Inggris, maka konstitusi tersebut yang berlaku. Hak Prerogatif hanya berdasar pada kekuasaan yang Ratu masih miliki sebagai kepala negara.
2. Penggunaan hak prerogatif tunduk pada kewajiban hukum dan keadilan yang umum.

3. Hak Prerogatif dapat dihapuskan atau dicabut oleh undang-undang namun tidak dapat ditambahkan atau diperluas hak-hak didalamnya.

The Public Administration Select Committee bahkan telah mengidentifikasi tiga kategori dari kekuasaan yang dimiliki oleh Hak Prerogatif pada tahun 2004.

- a. Kedaulatan secara konstitusi dari Hak Prerogatif. Yaitu wewenang yang dimiliki dari pihak kerajaan untuk: memberi nasihat, mendorong dan memperingatkan Perdana Menteri, menunjuk Perdana Menteri, serta menyetujui undang-undang.
- b. Hak prerogatif resmi dari Raja atau Ratu – bahwa mereka tidak dapat berbuat salah.
- c. Kekuasaan prerogatif di lembaga eksekutif – kekuasaan yang dalam sejarahnya melekat pada kerajaan (Raja dan Ratu) yang kini secara konstitusional dilaksanakan oleh Perdana Menteri yang bertindak atas nama Kedaulatan Kerajaan, termasuk didalamnya: membuat dan meratifikasi perjanjian internasional, pelaksanaan diplomasi, pemerintahan dari wilayah luar negeri, pengerahan pasukan bersenjata, pertahanan, keamanan nasional, dan perang.

Pada September 2013, *The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* mengimplementasikan

sebuah perjanjian yang dicapai oleh Amerika Serikat dan Rusia untuk menghancurkan senjata kimia milik Suriah. Damaskus diberikan waktu satu minggu untuk menyerahkan daftar senjata kimia yang dimilikinya, tipe mesiu dan lokasi penyimpanan, produksi dan penelitian serta fasilitas pengembangan. Kemudian, setelah Suriah menyerahkan daftar tersebut, OPCW memasuki Suriah pada tanggal 1 Oktober (BBC News, 2014).

Prosedur penghancuran senjata kimia dimulai pada tanggal 6 oktober yang diawasi oleh OPCW. Pada tanggal 31 Oktober, OPCW mengkonfirmasi bahwa Suriah mendeklarasikan tentang peralatan dan bahan-bahan untuk memproduksi senjata kimia telah dihancurkan. Pada bulan Januari, kepala dari misi tersebut yaitu Ahmet Uzumcu menyatakan bahwa telah ada penundaan dalam pemindahan bahan kimia sepanjang jalan dari Damaskus ke Homs. Dia mengatakan bahwa hal ini terjadi karena masalah teknis dan kesulitan yang dihadapi dalam situasi perang (Daryl Kimball, 2018).

Perwakilan Duta Besar Amerika Serikat, Robert Mikulak, menyatakan bahwa ia yakin hanya 4% kapasitas senjata kimia milik Suriah yang sudah dihancurkan. Sedangkan pada perjanjian tersebut, penghancuran secara total harus sudah dipenuhi pada pertengahan tahun 2014. Jika tidak, Inggris, Amerika, dan Prancis mengancam akan melakukan serangan udara terhadap Suriah (BBC News, 2014).

Memasuki pertengahan tahun 2014, nyatanya hanya ada 32% total senjata kimia

yang berhasil dihancurkan. Kemudian pada bulan September 2014, OPCW mengkonfirmasi adanya serangan dengan gas klorin oleh rezim Suriah dimana hal tersebut kemudian menjadi preferensi keputusan kebijakan luar negeri Inggris yang baru dimana sebelumnya hanya terlibat dalam hal-hal kemanusiaan lalu berubah menjadi intervensi militer. Inggris kemudian melakukan serangan pada tahun 2015 dan 2018 sebagai respon terhadap gagalnya Suriah untuk memenuhi perjanjian penghancuran senjata kimia dan malah menggunakannya kembali hingga tahun 2018 (Daryl Kimball, 2018).

3. Justifikasi Keterlibatan Inggris secara Militer dalam Perang Suriah

Menurut *English School*, masyarakat internasional melihat Inggris sebagai negara yang besar dan kuat. Hal ini juga merupakan nilai dasar dari mazhab ini yang menyebut bahwa tatanan masyarakat internasional adalah masyarakat anarki yang mana poin utamanya adalah peningkatan serta pemeliharaan nilai fundamental masyarakat internasional yaitu ketertiban dan keadilan internasional. Pihak yang bertanggung jawab atas nilai fundamental tersebut adalah negara yang besar dan kuat. Negara yang besar dan kuat ini berhak untuk mengintervensi suatu negara lain atas doktrin untuk melindungi R2P (*Responsible to Protect*) dimana syaratnya, warga di negara tersebut mengalami penderitaan karena perang atau konflik yang tidak dapat diselesaikan

oleh pemerintahan di negaranya sendiri (Jackson & Sorensen, 2013).

Faktanya, Inggris adalah pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, serta anggota organisasi pertahanan NATO (North Atlantic Treaty Organization). Karenanya, Inggris dianggap sebagai negara yang penting, besar, dan kuat di dunia internasional dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-6 di seluruh dunia serta dengan kekuatan militer terkuat ke-6 di dunia (Editorial, 2010).

Dengan semua kapasitas yang dimiliki oleh Inggris tersebut, sebagai dasar hukum dari intervensi militer yang dilakukan Inggris terhadap Suriah adalah sebagai bentuk dari intervensi kemanusiaan untuk mencegah terjadinya kekejaman serta penderitaan pada penduduk sipil Suriah yang mungkin akan lebih parah. Selama perang 8 tahun Suriah, hampir 500.000 orang telah tewas, jutaan orang menjadi pengungsi dan sisanya berada dalam keadaan terjebak dalam perang (Commons, 2017-2019).

Inggris kemudian mengeluarkan laporan yang berisi justifikasi tindakannya tersebut. Terdapat tiga alasan mengapa serangan udara terhadap Suriah memenuhi kriteria hukum internasional untuk sebuah aksi militer atas dasar kemanusiaan (Commons, 2017-2019).

1. Penggunaan senjata kimia mematikan oleh rezim Suriah yang dilakukan berulang kali dan merupakan kejahatan perang serta sangat mungkin rezim tersebut akan berusaha menggunakan senjata-senjata seperti itu lagi.

2. Upaya-upaya lain seperti upaya diplomatik untuk meringankan penderitaan kemanusiaan yang disebabkan oleh penggunaan senjata kimia telah diblokir dan tidak ada “alternatif praktis” yang lain untuk serangan tersebut.
3. Tindakan militer tersebut dipertimbangkan dengan cermat dan dinilai perlu untuk tujuan kemanusiaan.

Intervensi secara militer ini juga memiliki justifikasi atas dasar peristiwa yang terjadi.

1. Rezim Suriah telah menggunakan senjata kimia sejak tahun 2013. Serangan di Damaskus Timur pada tanggal 21 Agustus 2013 telah menewaskan 800 penduduk sipil. Rezim Suriah pun gagal untuk mengimplementasikan komitmennya pada tahun 2013 untuk memastikan pemusnahan kapabilitas senjata kimia miliknya. Penggunaan senjata kimia yang mematikan oleh rezim Suriah merupakan kejahatan perang dan kejahatan melawan norma-norma kemanusiaan.
2. Upaya dunia internasional termasuk Inggris untuk mengurangi kekejaman kemanusiaan telah di blok oleh rezim dan sekutunya. Minggu pertama bulan April 2018, Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan PBB. Upaya ini adalah

untuk menggagalkan pembentukan mekanisme investigasi yang tidak memihak. Sejak 2013, aksi diplomatik, sanksi keras, maupun serangan AS terhadap pangkalan udara Shayrat pada April 2017 tidak cukup untuk menurunkan kemampuan senjata kimia Suriah atau menghalangi rezim Suriah dari tindakannya untuk menimbulkan kekejaman terhadap kemanusiaan yang lebih ekstrem melalui penggunaan senjata kimia dalam skala yang besar.

3. Pada keadaan tersebut, dan sebagai tindakan luar biasa dengan alasan kebutuhan kemanusiaan, intervensi militer untuk menyerang dilakukan dengan hati-hati terhadap target yang spesifik agar tujuannya untuk mengurangi kejahatan kemanusiaan dapat tercapai dan dibenarkan secara hukum.